

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
ZONA INTEGRITAS (ZI)
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI KAB.
KEDIRI KELAS I A**

**TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, telah disusun Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA Triwulan IV tahun 2023 ini.

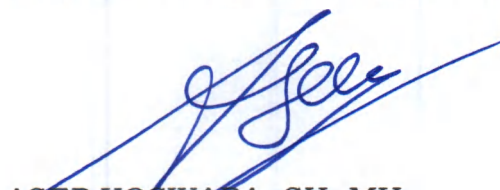
Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan public yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survey Persepsi Korupsi kepada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survey dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA.

Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Tim Survey maka disusun laporan ini yang dimaksud untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

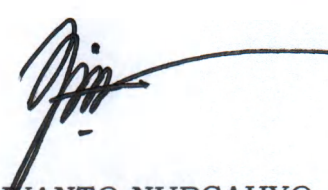
Semoga hasil Survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih dari korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas I A Triwulan IV tahun 2023 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pembina Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri


ASEP KOSWARA, SH.,MH.
NIP. 19681208 199403 1 001

Kediri, 02 Januari 2024
Ketua Tim.


GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE., SH.
NIP. 19790920 200604 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
KUESIONER SURVEI	1
BAB II	4
METODOLOGI SURVEI.....	4
A. Kriteria Responden	4
B. Metode Pencacahan	4
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	4
BAB III.....	6
PENGOLAHAN SURVEI	6
A. Analisis Hasil Survei	6
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	13
BAB IV	17
DATA SURVEI	17
A. Data Responden.....	17
BAB V	20
PENUTUP	20
A. KESIMPULAN	20
B. REKOMENDASI	20
DAFTAR DUKUNG LAINNYA	21

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Indeks pada Indikator Diskriminasi Pelayanan	6
2. Indeks Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan	8
3. Indeks pada Indikator Penerimaan Imbalan Diluar Ketentuan ..	9
4. Indeks pada Indikator Pungutan Liar	10
5. Indeks pada Indikator Percaloan Tidak Resmi	11
6. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri	12
7. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri	13
8. Tingkat Pendidikan Responden	17
9. Jenis Pekerjaan Responden	18
10. Usia Responden	19

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1. Briefing Hakim Pengawas PTSP kepada petugas PTSP untuk memberikan layanan yang bersih dan bebas dari intervensi	14
2. Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) di meja PTSP sebagai panduan teknis pelayanan publik	15
3. Daftar Waktu dan Tarif layanan di PTSP, bisa dilihat langsung pencari keadilan di meja PTSP.	15

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pengisian Kuesioner dilakukan melalui link sebagai berikut :

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_survey_zi/index_spak

Responden terlebih dahulu melakukan pengisian identitas responden, jenis layanan yang didapatkan serta kuesioner survei yang seluruhnya wajib untuk diisi. Kuesioner tersebut terdiri dari 5 pertanyaan, yakni meliputi :

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
 - Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
 - Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
 - Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
 - Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?
 - Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

- o Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

- o Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- o Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- o Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- o Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

4. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?

- o Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih dll)
- o Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
- o Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
- o Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

5. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?

- Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

BAB II

METODOLOGI SURVEY

A. Kriteria Responden

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel responden yakni menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai responden

B. Metode Pencacahan

Metode pencacahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan surveiIPK.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi

masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survey

1. Indeks persepsi korupsi perindikator.

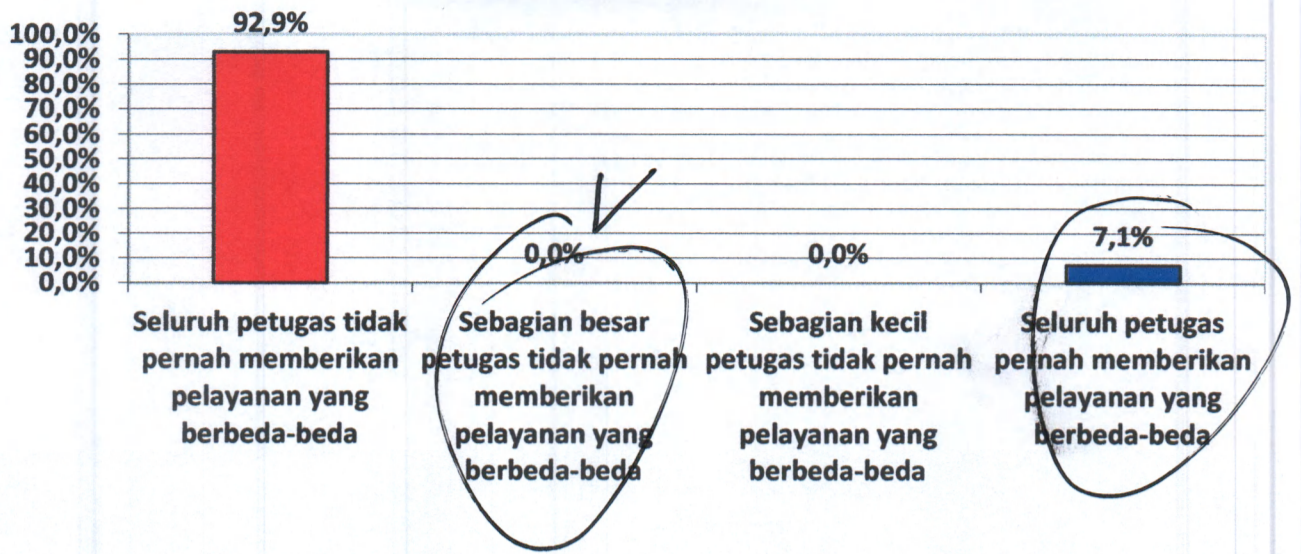
1.1 Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi pelayanan ini menunjukkan hasil pada index 3,786 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari diskriminasi pelayanan.

Tabel 1.

Indeks pada indikator Diskriminasi Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Seluruh petugas tidak pernah memberikan pelayanan yang berbeda-beda	4	39	92,9
2.	Sebagian besar petugas tidak pernah memberikan pelayanan yang berbeda-beda	3	0	0,0
3.	Sebagian kecil petugas tidak pernah memberikan pelayanan yang berbeda-beda	2	0	0,0
4.	Seluruh petugas pernah memberikan pelayanan yang berbeda-beda	1	3	7,1
Jumlah			42	100.0



1.2. Indikator Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan.

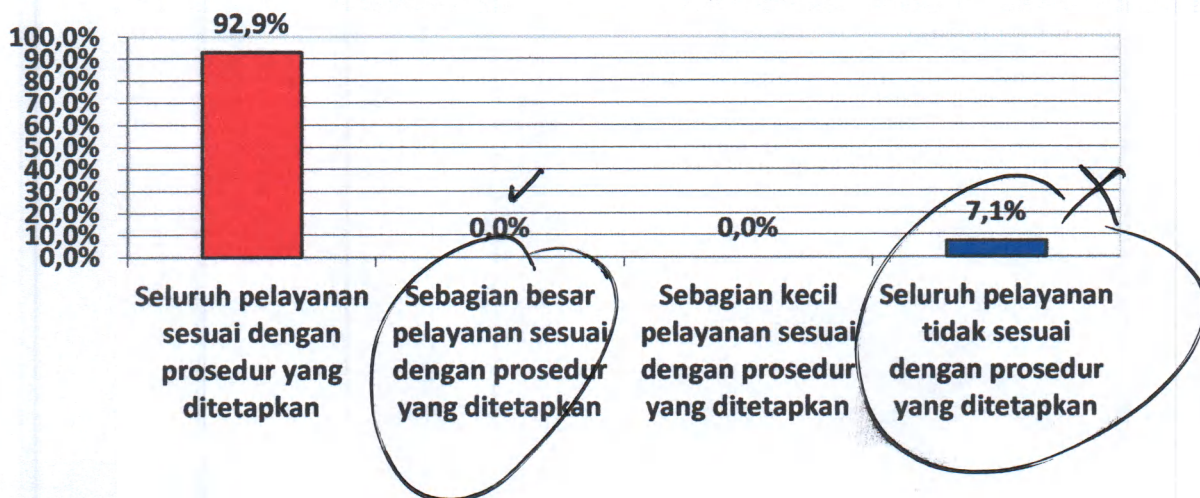
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan ini menunjukkan hasil pada index 3,786

Indeks tersebut menunjukkan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan.

Tabel 2.

Indeks Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Seluruh pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	4	39	92,9
2.	Sebagian besar pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	3	0	0,0
3.	Sebagian kecil pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	2	0	0,0
4.	Seluruh pelayanan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	1	3	7,1
Jumlah			42	100.0



1.3. Indikator Penerimaan Imbalan diluar ketentuan.

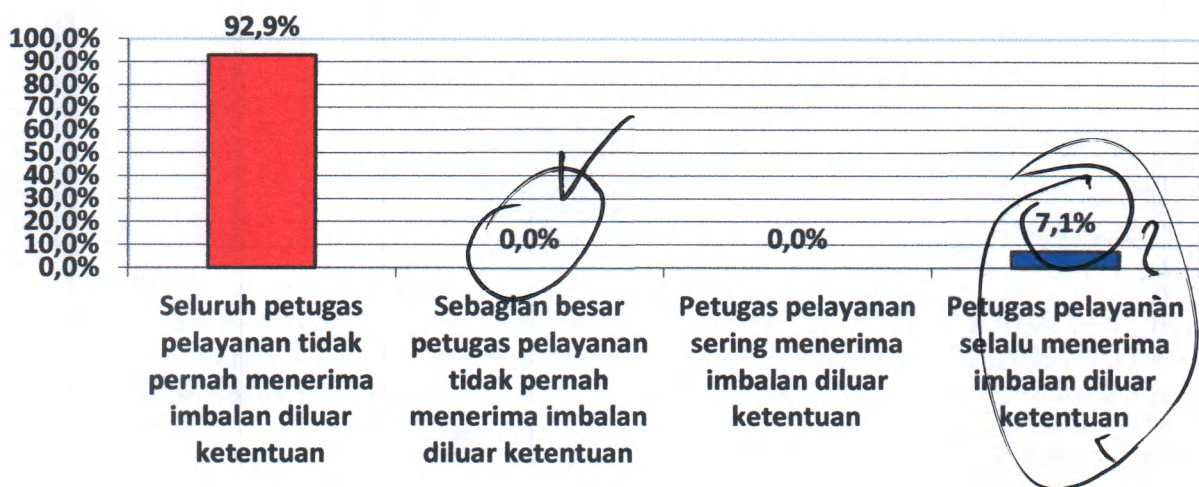
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan diluar ketentuan ini menunjukkan hasil pada index 3,786

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menerima imbalan diluar ketentuan.

Tabel 3.

Indeks pada indikator Penerimaan Imbalan diluar ketentuan.

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Seluruh petugas pelayanan tidak pernah menerima imbalan diluar ketentuan	4	39	92,9
2.	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima imbalan diluar ketentuan	3	0	0,0
3.	Petugas pelayanan sering menerima imbalan diluar ketentuan	2	0	0,0
4.	Petugas pelayanan selalu menerima imbalan diluar ketentuan	1	3	7,1
Jumlah			42	100.0



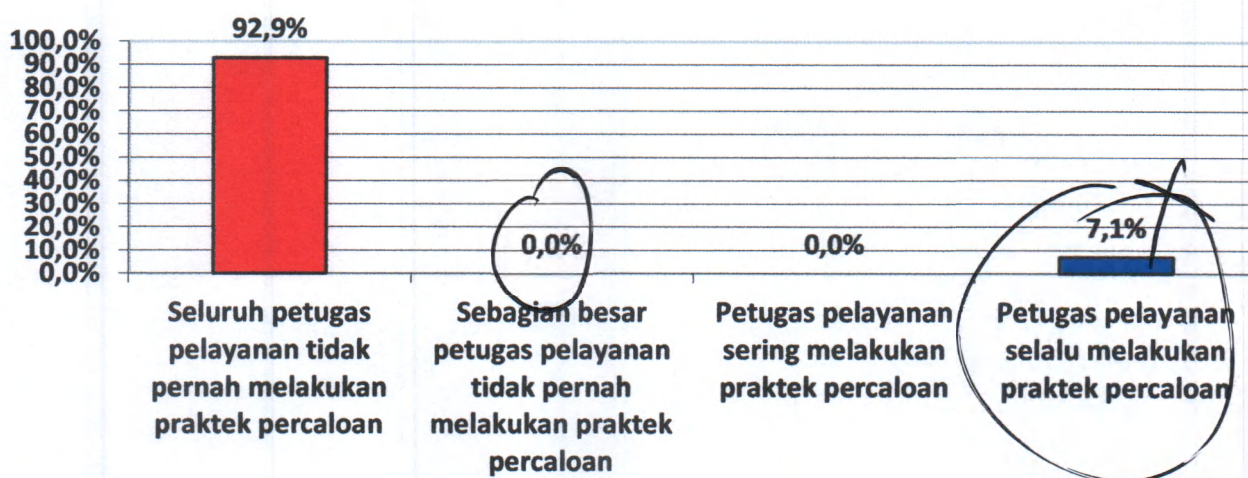
1.5. Indikator Percaloan Tidak Resmi

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan Tidak Resmi ini menunjukkan hasil pada index 3,786. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya Percaloan Tidak Resmi.

Tabel 5.

Indeks pada indikator Percaloan Tidak Resmi

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan	4	39	92,9
2.	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan	3	0	0,0
3.	Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan	2	0	0,0
4.	Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan	1	3	7,1
Jumlah			50	100.0

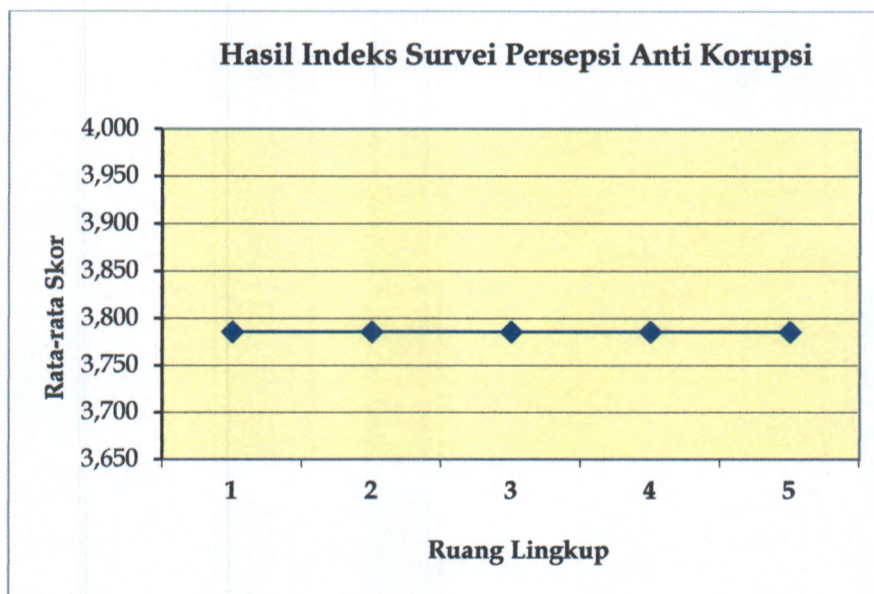


2. Indeks Zona Integritas Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri sebesar 94,64.

Tabel 6.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Ket	Indikator					
	Diskriminasi pelayanan	Pelayanan diluar prosedur	Penerimaan diluar ketentuan	Pungutan Liar	Percaloan Tidak Resmi	
Jumlah	159	159	159	159	159	
NRR per RL	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786	
NRR Tertimbang	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	3,79
NILAI PERSEPSI ANTI KORUPSI						94,64



Indeks 94,64 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00.

Tabel 7.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kab. Kediri

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil Zona Integritas (ZI) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pengguna layanan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada Triwulan IV, adapun nilai tertinggi dan terendahnya sebagai berikut:

- Indeks Zona Integritas (ZI) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tertinggi terdapat pada:
 1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,786 kategori sangat baik;
 2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,786 kategori sangat baik;
 3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?, dengan nilai rata-rata 3,786 kategori sangat baik;

- Indeks Zona Integritas (ZI) Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Terendah terdapat pada:
 1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,786 kategori sangat baik
 2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,786 kategori sangat baik;
 3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?, dengan nilai rata-rata 3,786 kategori sangat baik;

Tindak Lanjut atas Indeks Zona Integritas (ZI) Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Terendah sebagai berikut:

1. Indikator tidak adanya diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan
 - Pengawas PTSP mengoptimalkan peran petugas PTSP untuk memberikan pelayanan yang prima tanpa adanya diskriminasi kepada semua pencari keadilan.
 - Pengawas PTSP mewajibkan petugas PTSP untuk memberikan informasi secara transparan dan jelas;



Gambar 1. Briefing Hakim Pengawas PTSP kepada petugas PTSP untuk memberikan layanan yang bersih dan bebas dari intervensi.

2. Indikator Tidak adanya pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan.
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri melakukan briefing menyampaikan agar pegawai PTSP memahami penanganan pelayanan sesuai dengan SOP berlaku



Gambar 2. Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) di meja PTSP sebagai panduan teknis pelayanan publik

- Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri menekankan kepada pegawai PTSP untuk mengetahui alur pelayanan kepada pencari keadilan melalui checklist daftar alur pelayanan;



Gambar 3. Daftar Waktu dan Tarif layanan di PTSP, bisa dilihat langsung pencari keadilan di meja PTSP.

3. Tidak adanya penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan.
- Pimpinan Negeri Kab. Kediri mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak menerima dan meminta apapun kepada para pencari keadilan;
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri mengatakan untuk menjadikan pengadilan sebagai wadah/tempat yang bersih untuk mencari keadilan bagi siapapun;
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri mengatakan jikalau ada yang memberikan tanda terima kasih atas kemauan sendiri agar menerimanya berdasarkan undang-undang yang berlaku;

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden

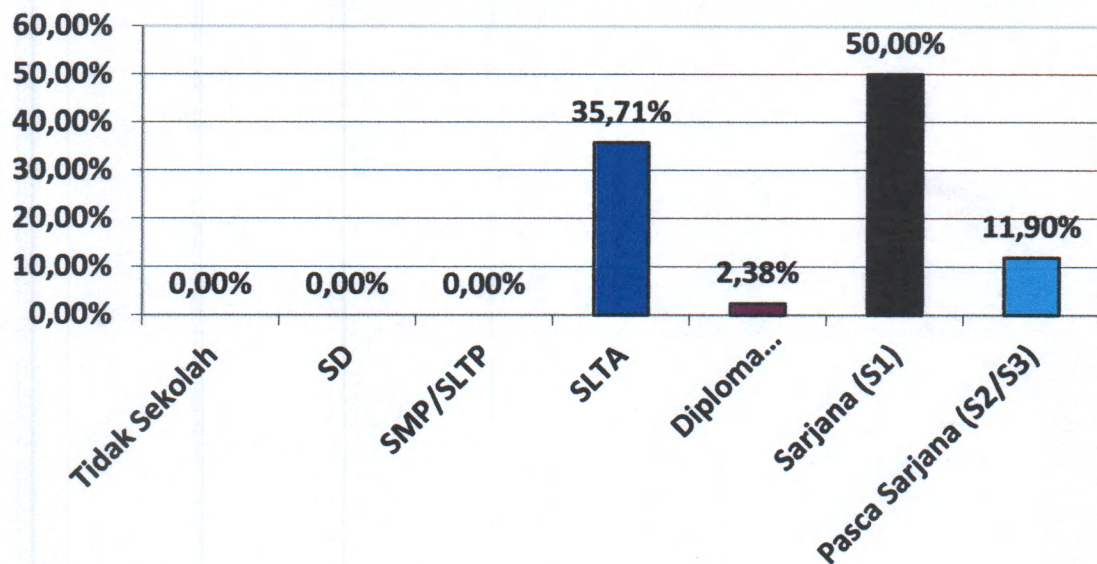
1. Profil responden

1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki terakhir Strata-1 (S-1) adalah 21 responden dengan persentase 50,0 %.

Tabel 8.
Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0,0
3	SMP / SLTP	0	0
4	SLTA	15	35,71
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	1	2,38
6	Sarjana (S1)	21	50,0
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	5	11,90
Jumlah		42	100,0

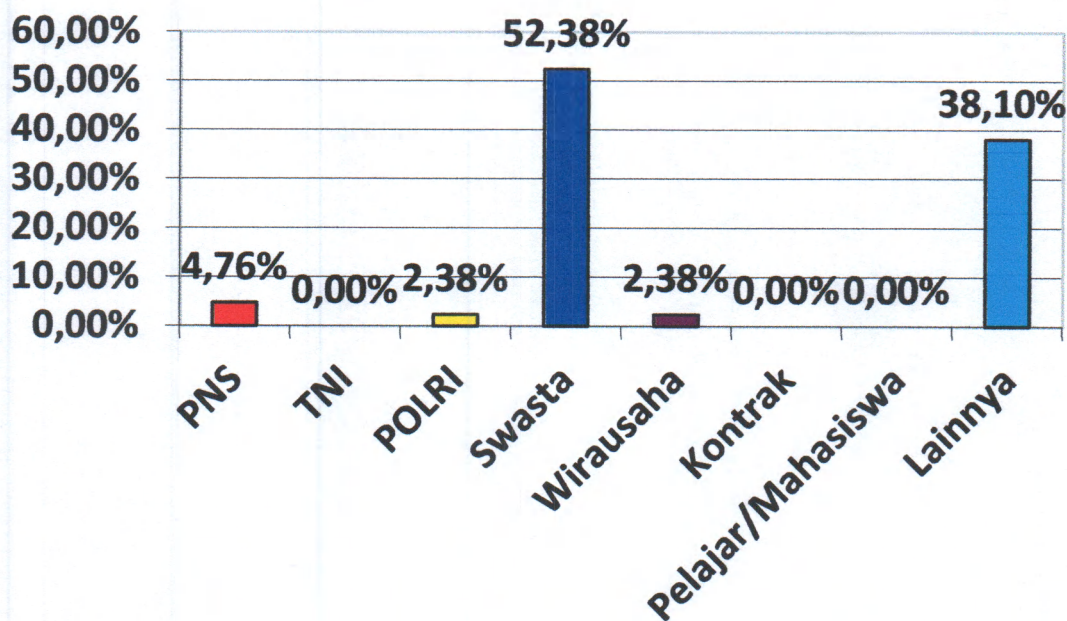


1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 52,38 % atau sebanyak 22 responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Swasta .

Tabel 9.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	2	4,76
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	2,38
4	Swasta	22	52,38
5	Wirausaha	1	2,38
6	Kontrak	0	0,0
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0,0
8	Lainnya	16	38,10
	Jumlah	42	100.0

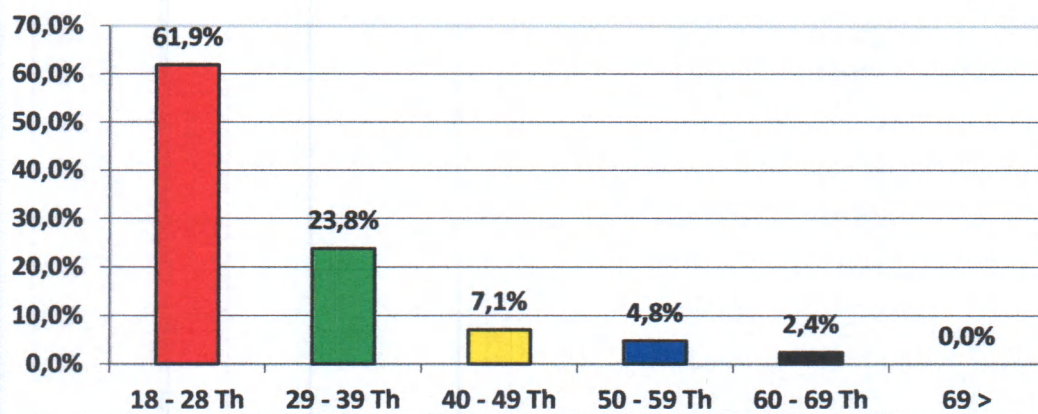


1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun. Bagi kelompok usia di atas 28 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 69 tahun.

Tabel 10.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 – 28 Th	26	61,9
2	29 – 39 Th	10	23,8
3	40 – 49 Th	3	7,1
4	50 – 59 Th	2	4,8
5	60 - 69 Th	1	2,4
6	69>	0	0
Jumlah		42	100.0



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Zona Integritas (ZI) Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 94,64 **atau** masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Diskriminasi Pelayanan, mendapat indeks 3,786
2. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur, mendapat indeks 3,786
3. Indikator Penerimaan Imbalan Diluar Ketentuan, mendapat indeks 3,786
4. Indikator Pungutan Liar, mendapat indeks 3,786
5. Indikator Percaloan Tidak Resmi, mendapat indeks 3,786

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas 1A Tahun 2023 bulan Oktober s/d Desember tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 94,64 atau masuk pada persepsi 81,26 – 100,00 Namun dari lima indikator penyusun tersebut menunjukkan keseluruhannya memiliki indeks yang sama.

DATA DUKUNG LAINNYA

ANALISIS DATA ZONA INTEGRITAS (ZI)
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN IV BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2023
DENGAN NILAI INDEKS 3.79 / 94.64 %

Frequency Table

VAR00001

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.1	7.1	7.1
	4.00	39	92.9	92.9	100.0
Total		42	100.0	100.0	

VAR00002

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.1	7.1	7.1
	4.00	39	92.9	92.9	100.0
Total		42	100.0	100.0	

VAR00003

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.1	7.1	7.1
	4.00	39	92.9	92.9	100.0
Total		42	100.0	100.0	

VAR00004

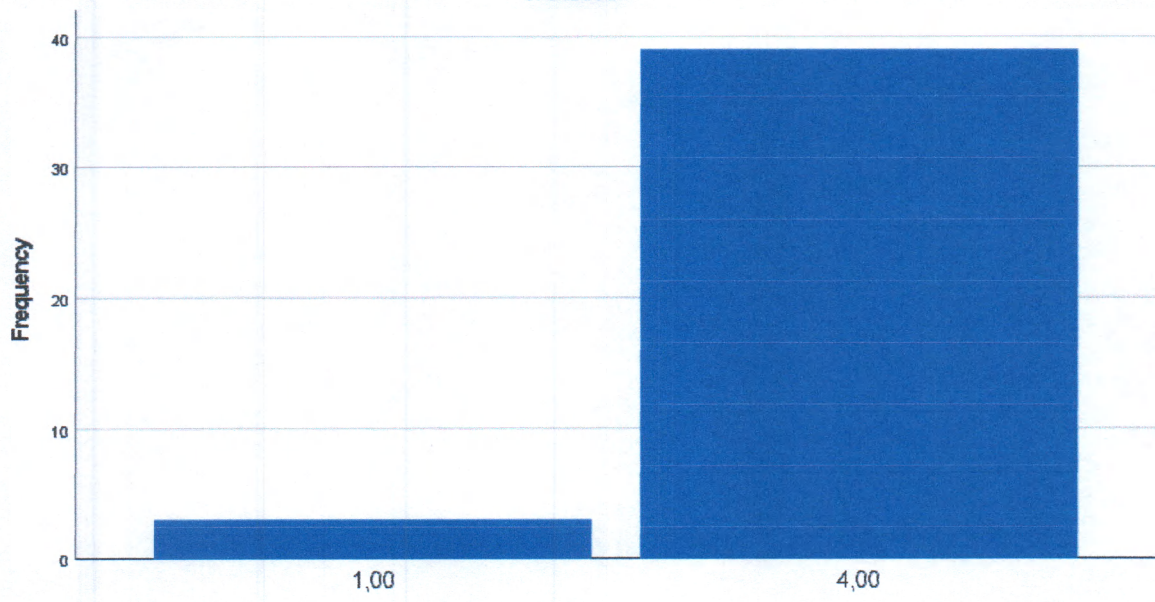
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.1	7.1	7.1
	4.00	39	92.9	92.9	100.0
Total		42	100.0	100.0	

VAR00005

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	7.1	7.1	7.1
	4.00	39	92.9	92.9	100.0
Total		42	100.0	100.0	

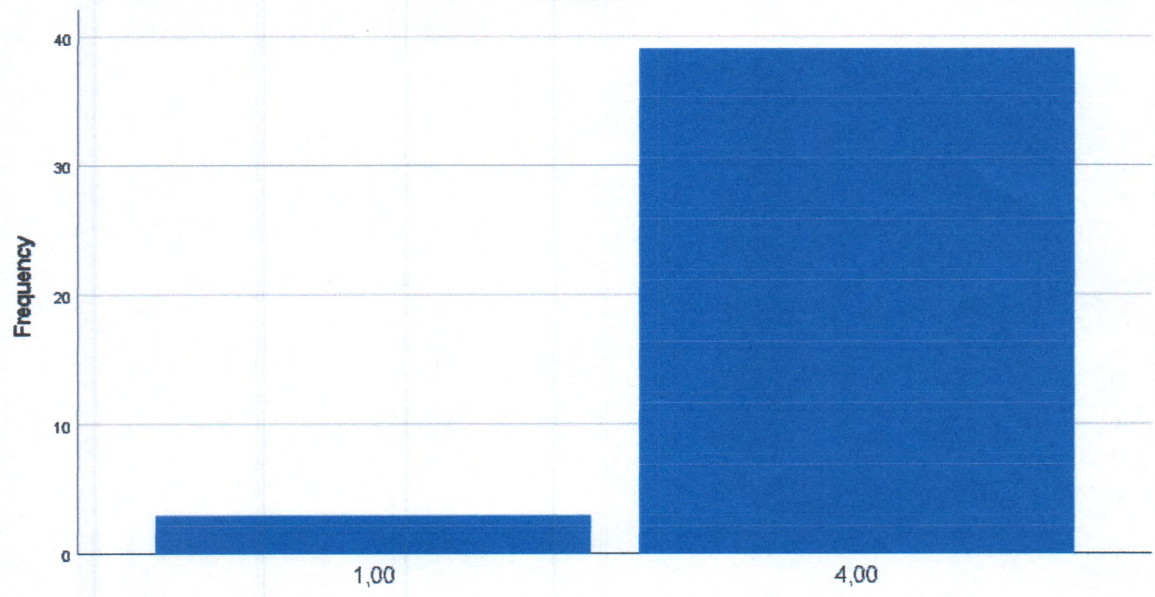
Bar Chart

VAR00001



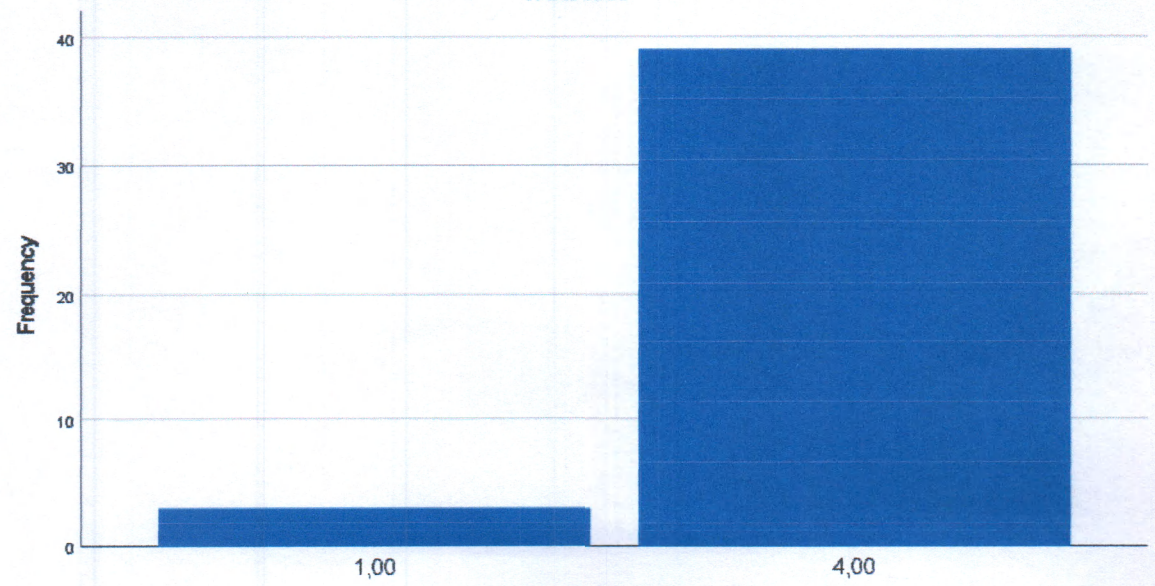
VAR00001

VAR00002

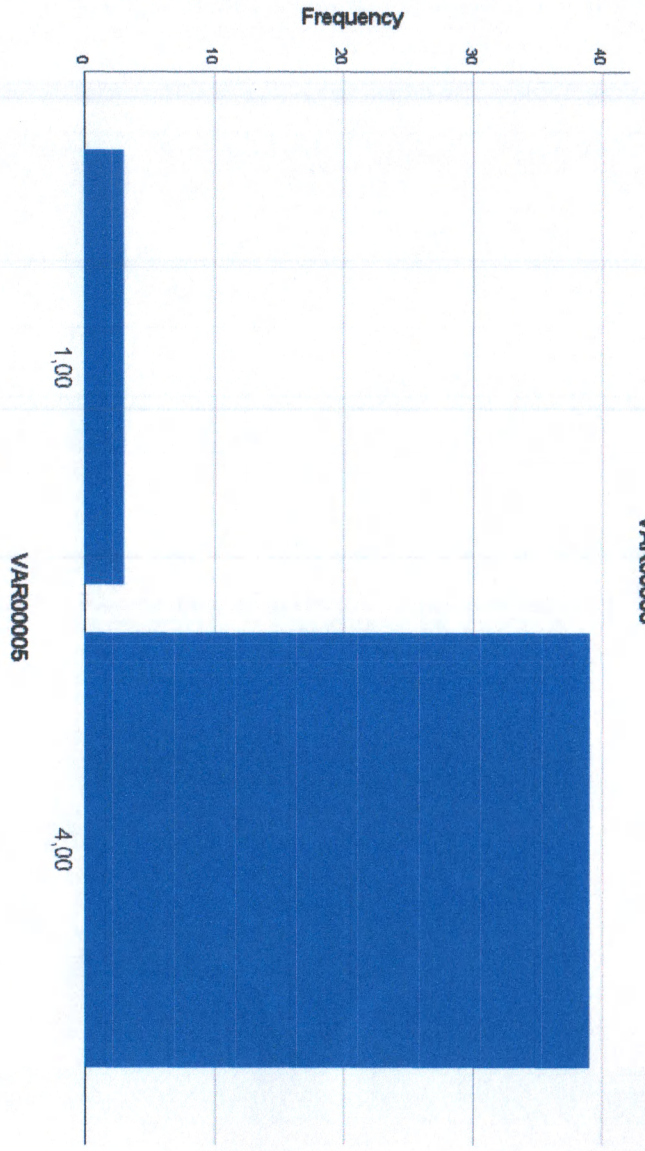
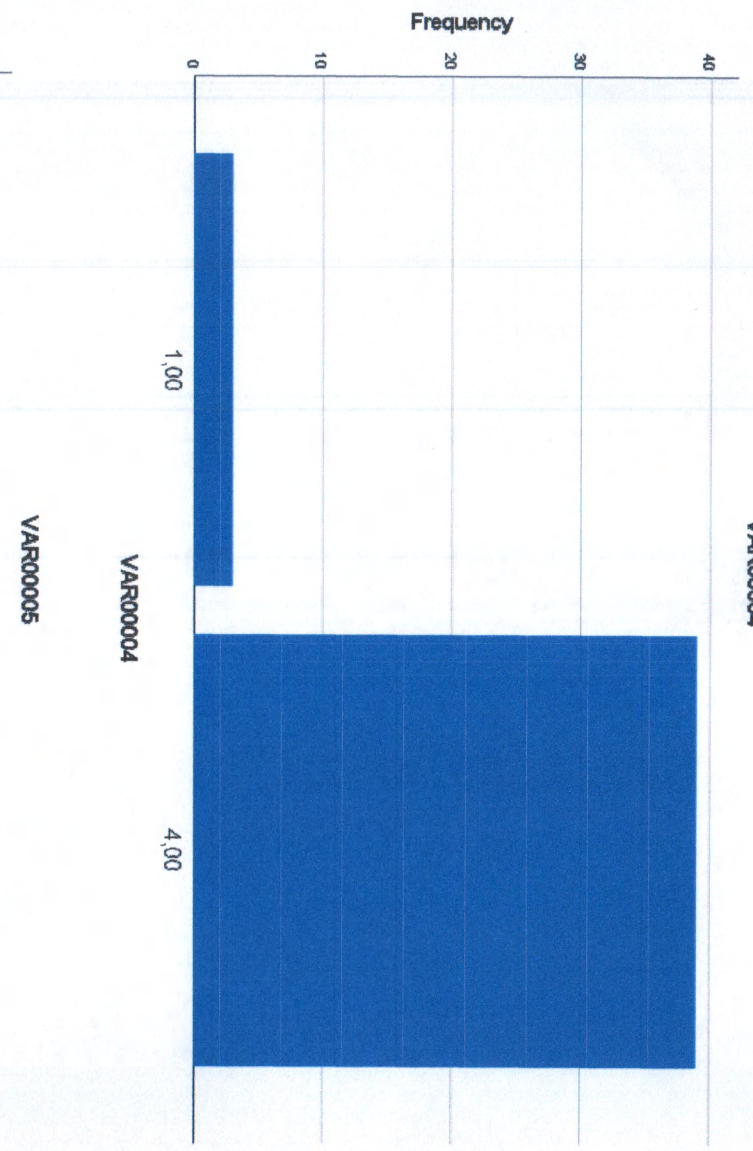


VAR00002

VAR00003



VAR00003



ANALISIS DATA
ZONA INTEGRITAS (ZI) SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS 1 A
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.
0354. 682056/ Fax. 0354. 682056.

No. Resp	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN					Keterangan
	1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	
23	1	1	1	1	1	
24	1	1	1	1	1	
25	4	4	4	4	4	
26	1	1	1	1	1	
27	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	

43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						

96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						

149						
150						
Jumlah	159	159	159	159	159	
NRR per RL	3,786	3,786	3,786	3,786	3,786	
NRR Tertimbang	0,757	0,757	0,757	0,757	0,757	3,79
NILAI PERSEPSI ANTI KORUPSI						94,64

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- SPAK = Survey Persepsi Anti Korupsi
- *) = Jumlah NRR SPKP tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x (1/5)

SPKP UNIT PELAYANAN : 94,64

Kategori: SANGAT BERSIH DARI KORUPSI

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 : 3,26 - 4,00
- B (Baik) : 62,51 - 81,25 : 2,51 - 3,25
- C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50 : 1,76 - 2,50
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75 : 1,00 - 1,75

Tabel

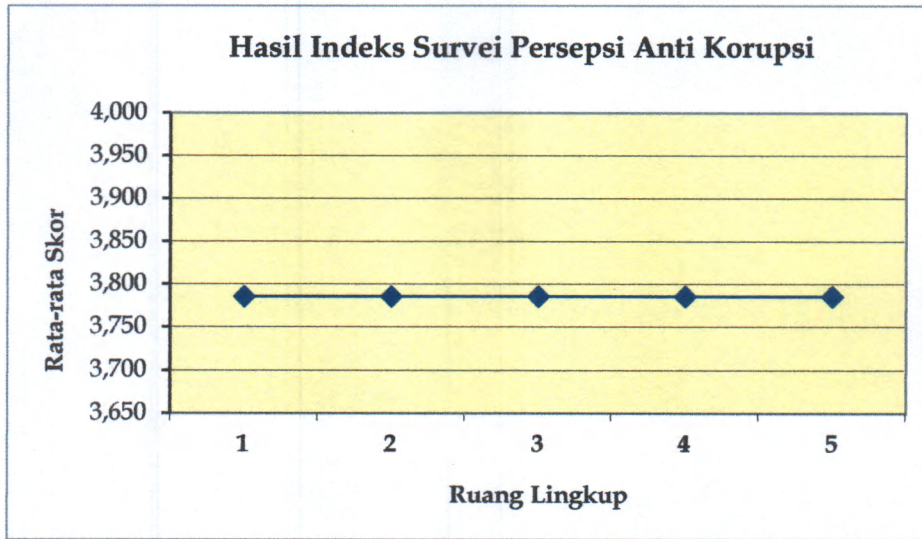
RINGKASAN INDEKS SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi:

94,64

Kategori: SANGAT BERSIH DARI KORUPSI

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Informasi Pelayanan	3,786	Sangat Bersih	1
2	Persyaratan Pelayanan	3,786	Sangat Bersih	1
3	Prosedur / alur Pelayanan	3,786	Sangat Bersih	1
4	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,786	Sangat Bersih	1
5	Tarif Biaya Pelayanan	3,786	Sangat Bersih	1



**QUALITY MANAGER
REPRESENTATIVE**

[Signature]
EDI SUBAGIYO, SH., MH.
NIP. 19740615 199303 1 001

**KETUA TIM
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

[Signature]
I. MD. WITAMA, SH.
NIP. 19660731 199303 1 003

**KETUA TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI**

[Signature]
ASEP KOSWARA, SH., MH.
NIP. 19681208 199403 1 001